

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA PASAR GAMBIR**

**(Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

No. Reg: 02/PK-VI/I-2019

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA GAMBIR

Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Sumatera Barat

OKTAF VI ANDO, 1210113148, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukum Tata Negara) Jumlah Halaman 92, Tahun 2019

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan kedudukan komoditas gambir dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengaturan Harga Gambir, dan apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir yang akan dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Sumatera Barat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, deskriptif yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas oleh beberapa ahli ketatanegaraan tentang pemerintahan daerah dan sosial ekonomi pertanian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus membentuk peraturan perundang-undangan terkait tentang penentuan harga gambir berdasarkan asas otonomi yang diakui dan memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya dengan jalan membentuk suatu industri pengolahan gambir yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam bertataniaga gambir. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komoditas gambir belum memiliki suatu kerangka acuan secara eksplisit, hanya sebatas perencanaan yang dituangkan dalam rencana induk pengembangan industri nasional dan rencana pengembangan jangka panjang dan menengah daerah provinsi sumatera barat.

